



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Siaran Pers

Periode : Agustus 2011

Edisi : 22 Agustus 2011

JSMP menyerahkan Usulan ke Parlemen Nasional sehubungan dengan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Buku III mengenai “hak atas barang”

Pada tanggal 19 Agustus 2011, JSMP melalui Unit LRU/Sub Program Pemantauan Parlemen (POP), menyerahkan sebuah ‘Usulan’ untuk kedua kali kepada Parlemen Nasional mengenai Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata – Buku III yang mengatur mengenai ‘hak atas barang’.

Pada hari sebelum tanggal 18 Agustus 2011, JSMP juga menyampaikan surat permohonan kepada Yang Mulia Ketua Parlemen Nasional untuk meminta pertemuan, dan jika memungkinkan, JSMP juga meminta kepada Presiden Parlemen Nasional untuk sementara menunda agenda sidang pleno untuk pengesahan umum terakhir dan menekankan pentingnya konsultasi publik sebelum undang-undang tersebut disahkan. .

Sesuai dengan agende Parlemen Nasional yang diakses oleh JSMP menyatakan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011, Parlemen Nasional akan melakukan pengesahan akhir terhadap atas rancangan undang-undang tersebut, setelah dilakukannya sesi diskusi pada tingkat Komisi Kerja Parlemen (*Komisaun Eventual*) di Maubisse dan Com-Lautem. Berdasarkan hasil kerja Komisi tersebut, Parlemen Nasional akan mengadakan sidang pleno dalam minggu ini untuk mengesahkan rancangan undang-undang ini dan mengirimnya ke Presiden Republik untuk diberlakukan.

Usulan¹ ini mengelaborasi pandangan , perspektif dan keprihatinan serta pengalaman praktis yang berasal dari hasil diskusi kelompok terbatas (FDG: *Focus Group Discussion*) yang selama ini dilakukan oleh JSMP dengan otoritas desa di empat (4) distrik seperti distrik (Manatutu, Liquiça, Dili dan Bobonaro) serta perwakilan dari masyarakat madani, perwakilan pengacara privadi termasuk perwakilan akademisi Fakultas Hukum dari Universitas di Timor Leste..

¹ [1] Untuk memperoleh informasi detail, silakan lihat pada website JSMP JSMP www.jsmp.minihub.org pada halaman/page: Parliament Watch Project , Bulan Agustus.

Direktur Eksekutif JSMP Luis de Oliveira Sampaio, mengatakan bahwa *JSMP merasa sangat prihatin dengan proses diskusi Rancangan Undang-Undang Kitab Perdata ini; karena berdasarkan pemantauan JSMP, proses tersebut tidak berjalan dengan maksimal, tidak produktif serta tidak melalui sebuah proses konsultasi yang terbuka untuk mendengar pendapat orang banyak mengenai bagaimana untuk mengatur dan menempatkan hubungan sosial dan kultur masyarakat Timór Leste dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di masa yang akan datang* .

Selama pemantauan JSMP di Parlemen Nasional, bahwa mayoritas wakil rakyat menghadapi kesulitan besar ^[2] untuk memahami dan berkontribusi terhadap proses diskusi rancangan undang-undang ini, karena rancangan undang-undang yang memiliki dua ribu-an lebih pasal ini ini hanya tersedia dalam bahasa Portugis..

Sampai saat ini, rancangan tersebut masih hanya dalam bahasa Portugis. Ketika JSMP menyerahkan Usulan ini ke Parlemen Nasional, secara informal, beberapa anggota Parlemen mengakui bahwa mereka menghadapi persoalan besar untuk memahami rancangan undang-undang tersebut karena persoalan teknis dalam rancangan undang-undang ini.

Usulan ini memuat keprihatinan JSMP mengenai waktu, bahasa dan studi kasus konkrit yang berkaitan dengan pasal yang tertera dalam rancangan undang-undang ini. Studi kasus tersebut berkaitan dengan pasal-pasal dalam rancangan ini. Studi kasus ini berhubungan dengan persoalan-persoalan dalam pasal 1259: mengenai pemeliharaan bibit/perkebunan dengan bibit orang lain), , pasal 1237^o ; mengenai bentuk perolehan hak milik , pasal 1238^o ; mengenaicara memperoleh hak milik, , Pasal 1232^o; mengenai tindakanmendapatkan kembali (klaim) hak milik, pasal 1245^o penyatuan/penggabungan barang dan pasal 1249^o mengenai penyatuan/pergeseran tanah karena bencana alam. .

Berdasarkan pada proses FGD yang diorganisir JSMP bersama dengan otoritas lokal, JSMP menyimpulkan bahwa akan berpotensi memunculkan kebingungan bagi seluruh masyarakat karena tidak cocok dengan kondisi riil dalam praktek kultural masyarakat Timór Leste, yang dapat memunculkan konflik antara masyarakat di masa mendatang.

Oleh karena itu, JSMP mendorong Parlemen Nasional untuk menunda agenda sidang pleno untuk proses pengesahan akhir global atas undang-undang ini untuk dilanjutkan dengan konsultasi publik dan terbuka untuk melibatkan institusi-institusi terkait yang relevan untuk menjamin bahwa undang-undang ini benar-benar mencerminkan kebutuhan dan realitas aktual masyarakat Timór Leste.

JSMP mendesak Parlemen Nasional untuk mempertimbangkan keperluan untuk berkonsultasi dengan cara yang terbuka untuk menjamin bahwa realitas dan konteks sosial dan kultural Timor

^[2] Lihat siaran pers, periode Juñu 2010, edisi 4 Juni 2010, pada *page* “Parliament Watch Project, dengan judul: *Bahasa Portugis mempersulit beberapa anggota Parlemen Nasional pada debat mengenai Usulan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Perdata*

tercermin dalam undang-undang ini. Hal ini hanya terjadi apabila Parlemen Nasional dapat menerjemahkan rancangan undang-undang ini ke dalam bahasa yang dipahami orang banyak agar dapat berkontribusi.

JSMP menyadari bahwa sebagai negara atau masyarakat demokratis, kita sangat membutuhkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk menentukan, mengatur dan menempatkan hubungan individu dan sosial antara masyarakat, akan tetapi hal ini tidak berarti mendesak atau memaksa Parlemen Nasional untuk secara terburu-buru mengesahkan undang-undang ini meskipun tidak mencerminkan praktek lokal dan kebiasaan yang merupakan kekayaan sosio-kultural masyarakat Timor Leste menurut Pasal 2 alinea 4 Konstitusi Timor Leste.

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org
Telpon: 3323883/7295795